BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pendidikan faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas proses pendidikan dilihat dari pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan bukan satu-satunya faktor keberhasilan, akan tetapi tanpa adanya pembiayaan yang mencukupi, maka pendidikan yang menjamin siswa yang memiliki mutu dan kualitas yang tinggi hanya ada dalam angan-angan. Sehingga pemerintah menetapkan dana pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bukti keseriusan pemerintah untuk memajukan mutu pendidikan Indonesia.

Kemudian yang menjadi masalah bukan hanya besaran dana yang mesti dikeluarkan, tetapi ketepatan dana yang dikeluarkan dan kemudian dialokasikan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Jangan sampai biaya yang besar hanya terbuang sia-sia akibat pengelolaan atau pemanfaatan dana yang tidak strategis dan tepat guna. Semua hal ini perlu diperhatikan oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah hingga seluruh masyarakat.

Sistem pengelolaan pembiayaan di tingkat satuan pendidikan di Indonesia belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perencanaan biaya (penganggaran) dari berbagai sumber dana belum terarah pada peningkatan mutu pendidikan. Artinya, kebutuhan biaya secara langsung berhubungan dengan PBM (Proses belajar mengajar) serta pembinaan guru dan peserta didik, belum

mendapatkan skala prioritas. Demikian pula biaya yang tersedia tidak dipergunakan secara efisien.

Dalam kaitan ini, fungsi pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan masih rendah sehingga sumber-sumber yang terbatas belum memberikan dampak yang optimal. Hal ini disebabkan pemanfaatan biaya masih kurang tepat dengan tidak memberikan prioritas bagi faktor-faktor yang benar-benar dapat memacu peningkatan prestasi belajar.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang evektivitas pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam mengimplementasikan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat atau pemerintah. Menyelenggarakan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terlupakan dalam kajian manajemen pendidikan.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen komponen lain. Dengan kata lain semua kegiatan di sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Oleh karena itu, dana-dana tersebut harus dikelola sebaik mungkin agar dapat di manfaatkan secara baik dan optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga

pendidikan saat ini membutuhkan perhatian khusus. Bukan hanaya dari pihak pemerintah saja yang harus mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan dilembaga pendidikan. Namun para orang tua, masyarakat juga dituntut aktif untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan sekolah.

Sebagai perwujudan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan program dana Bantuan Operasional Sekolah (Depdiknas: 2009), berdasarkan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Pengunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013 menerangkan bahwa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan, dengan sasaran semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia, dana BOS dikeluarkan dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode).

Selama ini sekolah hanya memiliki laporan laporan pertanggung jawaban sebagai bentuk transparansi keuangan sekolah. Diharapkan sekolah memiliki laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan sekolah yang terdiri atas neraca, laporan surplus, deposit, laporan arus kas serta perhitungan biaya yang dihabiskan oleh tiap siswa. Jadi pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap

siswa dalam tiap bulan, semester atau tahunnya

Kecamatan Bangun Purba merupakan Daerah yang memiliki dua sekolah menengah negeri yaitu SMK dan SMA serta memiliki dua sekolah swasta yaitu Madrasah Aliyah (MA) yang dibantu Dana BOS. Adapun SMA/MA/SMK yang berada di lingkungan Kecamatan Bangun Purba dapat dilihat pada tabel dibawah ini ;

Tabel 1.1 Data SMA/MA/SMK di Kecamatan Bangun Purba

No	Nama Sekolah
1	SMK N 1 Bangun Purba
2	SMA N 1 Bangun Purba
3	MA Al – Kahfi Bangun Purba
4	MA Al Fata Bangun purba

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Tabel 1.2 Data Penerimaan dan Realisasi Dana Bantuan Operasional (BOS) SMKN 1 Bangun Purba

No	Tahun	Penerimaan	Realisasi	Sisa
1.	2020	Rp. 217.000.000	Rp. 217.000.000	0
2.	2021	Rp. 308.000.000	Rp. 308.000.000	0
3.	2022	Rp. 362.000.000	Rp. 362.000.000	0

Sumber Data : Bendahara SMKN 1 Bangun Purba

Tabel 1.3 Data Penerimaan dan Realisasi Dana Bantuan Operasional (BOS) SMAN 1 Bangun Purba

No	Tahun	Penerimaan	Realisasi	Sisa
1.	2020	Rp. 570.000.000	Rp. 570.000.000	0
2.	2021	Rp. 580.300.000	Rp. 580.300.000	0
3.	2022	Rp. 620.100.000	Rp. 620.100.000	0

Sumber Data : Bendahara SMAN 1 Bangun Purba

Tabel 1.4 Data Penerimaan dan Realisasi Dana Bantuan Operasional (BOS) MA Al-Kahfi Bangun Purba

No	Tahun	Penerimaan	Realisasi	Sisa
1.	2020	Rp. 121.500.000	Rp. 121.500.000	0
2.	2021	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	0
3.	2022	Rp. 139.500.000	Rp. 139.500.000	0

Sumber Data : Bendahara MA Al-Kahfi Bangun Purba

Tabel 1.5 Data Penerimaan dan Realisasi Dana Bantuan Operasional (BOS) MA Al-Fata Bangun Purba

No	Tahun	Penerimaan	Realisasi	Sisa
1.	2020	Rp. 137.700.000	Rp. 137.700.000	0
2.	2021	Rp. 145.800.000	Rp. 145.800.000	0
3.	2022	Rp. 155.700.000	Rp. 155.700.000	0

Sumber Data : Bendahara MA Al-Fata Bangun Purba

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dana penerimaan dana BOS dari tahun 2020 hingga tahun 2022 sudah terealisasi semua. Dana penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dari APBN, pihak sekolah juga harus menggalang dana dari orang tua murid, karena penyelenggaraan pendidikan ini bersumber dari pihak lain, pengelola dana sudah seaharusnya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan. Pertanggung jawaban keuangan yang transparansi dan akuntabel diharapkan dapat memotivasi orang tua murid untuk ikut berperan dalam menanggung dana pendidikan.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat empat sekolah yang berada di lingkungan Kecamatan Bangun Purba. Berdasarkan hasil pra - survei yang dilakukan telah menemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat. Sekolah tidak pernah menyampaikan

jumlah subsidi yang diterima dari pemerintah dan sekolah tidak pernah memberikan laporan pengelolaaan dana kepada masyarakat secara transparan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa sarana dan prasarana sekolah adalah tanggungjawab pemerintah dalam hal ini di sekolah.

Dalam hal ini, tuntutan akuntabilitas mengharuskan penekanannya pada pertangungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat kepercayaan dari warga sekolah dan orang tua murid. Selama ini, pengelolaan pendidikan banyak sekolah terkesan tertutup bagi pihak luar. Masyarakat orang tua murid seolah-olah tidak banyak mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan disekolah, tidak dilibatkan dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekolah dan sebagainya. Pengelolaan yang tidak dianggap transparan dan akuntabel berdampak negatif bagi perkembangan sekolah, karena orang tua murid akan meragukan sumbangan yang mereka berikan akan benar benar dimanfaatkan bagi kepentingan penyelanggaraan pendidikan atau akan terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

Berdasarkan prosedur yang ada dana BOS perlu di kelola secara relevan dan efektif. “yaitu tujuan yang direncanakan semula benar-benar tercapai” (Artana, 2014).

Menurut Ibrahim, Bafadal. (2012) bahwa, organisasi dikatakan efektif

apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekolah pada dasarnya juga merupakan sebuah organisasi dengan demikian sekolah dapat dikatakan baik apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan di SMA/MA/SMK di Kecamatan Bangun Purba Antara Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Terhadap Efektifitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menyatakan bahwa sebagian besar dana yang digunakan dalam sekolah tersebut adalah dana dari siswa itu sendiri, dan setiap tahunnya dana yang cair hanya dipakai untuk menutupi utang yang telah dipinjam sebelumnya. Sesuai dengan Depdiknas (2009) bahwa, pengelolaan dana BOS dikatakan sangat efektif bila mencapai kriteria diatas 70%. Indikator perencanaan dengan besar persentase 91% berada pada kategori sangat efektif. dengan Perencanaan pengelolaan dana BOS yang efektif tentu akan menghasilkan realisasi yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK, SMA dan MA di Kecamatan Bangun Purba"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
2. Untuk mengetahui pengaruh traansparansis terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektifitas pengelolaan dana BOS.

1.4. Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga peneliti dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari
2. Bagi Sekolah Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan sekolah.

3. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dana BOS agar masyarakat mampu menganalisis apakah pengelolaan BOS yang ada di daerah mereka wajar atau tidak.
4. Bagi peneliti lain Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan, sumber informasi dan bahan referensi penelian selanjutnya agar bisa lebih dikembangkan untuk memperluas obyek penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Konsep Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan

2.1.1.1. Efisiensi

Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen sekolah karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah kelangkaan sumber dana, dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal.

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 3 berbunyi prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

Efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, pembelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan. (Hidayat, 2019)

Departemen pendidikan dan kebudayaan membedakan efisiensi pendidikan menjadi efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjukkan perbandingan antara prestasi belajar (ukuran non-moneter hasil

pendidikan) dan masukan biaya pendidikan.

Adapun efisiensi eksternal dihubungkan dengan metode *cost-benefit analysis,* yaitu perbandingan keuntungan finansial pendidikan, biasanya diukur dari penghasilan lulusan dengan seluruh jumlah dana yang dikeluarkan untuk pendidikannya.

Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Efisiensi yaitu penggunaan sumber daya manusia dalam menunjang pelayanan mengandung arti bahwa pembelanjaan dilakukan dengan pengorbanan yang minimal dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan. (Gafar, 2021)

Kemampuan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) yang profesional perlu terus diciptakan melalui peningkatan kemampuan aparat di sekolah secara efisien. Untuk kepentingan tersebut, perlu terus dikembangkan suatu sistem informasi manajemen yang bermutu melalui pembangunan basis data di daerah yang akan menjadi satu-satunya sumber data bagi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

2.1.1.2 Pengelolaan Dana Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 pasal 58 berbunyi prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggaraan, dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas prinsip umum dan prinsip khusus. Menurut Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2008 pasal 60 berbunyi yaitu:

1. Pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
3. Pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan satuan pendidikan.

Dalam dunia pendidikan kajian mengenai pendanaan/pembiayaan pendidikan menduduki posisi penting sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan/manajemen dana/keuangan dalam pendidikan, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). (Mujayaroh, 2020)

RKS/RKM merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah. dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari RKM selanjutnya akan diturunkan mennjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan

Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan.yang selanjutnya akan diwujudkan kedalam RAPBM. Pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan pelaporan dan pertangung jawaban yang dialokasikan untuk penyelengaraan pendidikan. Yang memiliki Tujuan ntuk mewujudkan tertib adminitrasi dan dapat dipertangungjawabkan. Dasar dari pengelolaan keuangan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas. Hal ini disebabkan jika pengelolaan berjalan baik serta akuntabel akan menimbulkan berbagai manfaat seperti berikut:

1. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien danefektif.
2. Memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta).
3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, ataupun penyimpangan- penyimpangan dana dari rencana semula.
4. Penyimpangan akan dapat dikendalikan apabila pengelolaan berjalan baik sesuai yang diharapkan, apabila kebocoran ini terjadi maka akan berakibat buruk, baik pada pengelola keuangan atasan langsung dan bendaharawanmaupun kepada lembaga pendidikan itu sendiri.

Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan dana, baik biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti-bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan.

Strategi sekolah dalam menggali dana pendidikan secara administratif sangat tepat karena berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah melakukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya dan sumber dana yang terdapat di dalam lingkungan sekolah. (Barlian, 2016)

Dalam MBS strategi tersebut dapat direalisasikan melalui penyelenggara berbagai kegiatan berikut:

1. Melakukan analisis internal dan eksternal terhadap berbagai potensi sumberdana.
2. Mengidentifikasi, mengelompokkan dan memperkirakan sumber-sumberdana yang dapat digali dan dikembangkan
3. Menetapkan sumber-sumber dana melalui :
    a. Musyawarah dengan orang tua siswa baru, pada awal tahun ajaran,
    b. Musyawarah dengan para guru untuk mengembangkan koperasi sekolah,
    c. Menggalang partisipasi masyarakat melalui dewan sekolah, dan
    d. Menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kesenian peserta didik untuk mengumpulkan dana dengan memanfaatkan fasilitas sekolah.

2.1.2. Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan masalah penting yang dikaji dalam ekonomi pendidikan.hal ini sejalan dengan pendapat Elchanan Cohn yang menyatakan sebagai berikut.

The issues that will concern us in this volume are conveniently grouped into five major categoris (major issues in the economics of

education):

a. *Indentification and measurement of the economic value of education*
b. *The allocation of resources in education*
c. *Teacher's salaries*
d. *The finance of education, and*
e. *Educational planning* (Haniyyah, 2014)

Dari kutipan di atas tampak bahwa masalah pembiayaan/pendanaan pendidikan merupakan salah satu isu utama yang dibahas dalam ekonomi pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pembiyaan pendidikan adalah berupa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang diperoleh, dan kepada siapa uang harus dibelanjakan.

Unsur biaya adalah hal yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya sangat memengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga/organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik, maka kegiatan tersebut dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penjelasan diatas menggambarkan bahwa pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan (revenue) dan penggunaan biaya (expenditure) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditentukan. (Masditou, 2017)

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana secara efisien. Makin efisien dana pada sistem pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, dengan efisiensi akan lebih banyak tujuan program yang dicapai dengan anggaran yang tersedia.

Efisiensi pendidikan artinya memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai optimalisasi yang tinggi. Dalam biaya pendidikan, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan di dalam mendayagunakan anggaran pendidikan dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor *input* pendidikan yang dapat memacu pencapaian prestasi peserta didik. (Wahyudin, 2021)

Agar dapat mengetahui efisiensi biaya pendidikan biasanya digunakan metode analisis keefektifan biaya *(cost effectiveness method)* yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan atau prestasi belajar. Upaya efisiensi dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Suatu sistem pendidikan dinilai memiliki efisiensi internal jika dapat mengahasilkan *output* yang diharapkan dengan biaya minimun. Dengan kata lain, bahwa dengan *input* tertentu dapat memaksimalkan *output* yang diharapkan. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisiensi jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Sementara istilah efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis. Cost benefit analysis,* yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan (biasanya diukur dengan penghasilan) dengan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk pendidikan.

Efisiensi eksternal dihubungkan dengan situasi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari hasil pendidikan. Dengan memahami konsep efisiensi di atas, maka makna efisiensi pembiayaan pendidikan tidak boleh disamakan dengan istilah penghematan atau *saving* (menabung, menyimpan) sebagaimana yang selama ini dipahami oleh sejumlah pengelola pendidikan. Menyamakan makna efisiensi dengan penghematan ini menyebabkan terjadinya kesalahpahaman kalau tidak dikatakan sebagai penyalahgunaan mata anggaran pendidikan yang sesuai dengan prosedur semestinya. Misalnya, biaya yang seharusnya digunakan untuk proses pembelajaran/tatap muka selama 5 kali seminggu dihemat menjadi 2 kali pertemuan, biaya yang seharusnya digunakan membeli 10 judul buku perpustakaan hanya dibelikan 5 judul, biaya yang disediakan untuk membeli sejumlah peralatan kelas hanya dibelanjakan sebagainya dengan alasan efisiensi anggaran. Padahal, tindakan semacam itu tidak termasuk dalam kategori efisiensi yang dimaksud dalam pembahasan ini, tetapi tindakan seperti itu dapat dikategorikan penghematan bahkan sudah mengarah pada penyelewengan.

Menurut Nanang Fattah (dalam Mulyono, 2010 : 11) menyatakan bahwa makna efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan.

Oleh sebab itu, mewujudkan efisiensi dalam pembiayaan pendidikan merupakan tanggungjawab semua yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan, dari pejabat pusat, daerah hingga para kepala sekolah/madrasah, para guru bahkan setiap peserta didik. Oleh sebab itu, biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah baik

berupa APBN/APBD, BOS/BOM, maupun dari masyarakat dan orang tua dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan amanah dalam upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan.

2.1.3. Indikator Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan

Efisiensi merupakan bagian penting dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Karena itu di dalam pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada indikator-indikator efisiensi yang dapat diukur dari beberapa aspek. Sejalan dengan hal ini menurut Mulyono (2014) menyatakan bahwa efisiensi pengelolaan dana pendidikan ditentukan oleh indikator-indikator berikut ini;

a. Tepat sasaran
b. Tepat jumlah
c. Tepat waktu

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk apa digunakan dan siapa yang menggunakan. Demikian pula dalam hal jumlah haruslah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan yang telah dihitung dan ditetapkan sebelumnya. Dalam hal waktu yang dipakai untuk pencairan dan penggunaannya juga harus sesuai denganberapa lama waktu yang ditetapkan.

2.1.4. Akuntabilitas

2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan *(disclouser)* dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, yang terdiri dariberbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. (Apriliani, 2022)

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Yenti, 2018). Adanya akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Idawati, 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 5 berbunyi prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Akuntabilitas berperan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggung jawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/stakeholders. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal: (a) pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, (b) anggaran pendapatan dan belanja sekolah, (c) pengelolaan sumberdaya pendidikan di sekolah, dan (d) keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah. Akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi 4: (1) akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan, (2) akuntabilitas kinerja *(product/quality accountability)*, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah, (3) akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main,

ketentuan, pedoman, dan sebagainya, dan (4) akuntabilitas keuangan (kejujuran) atau sering disebut *(financial accountability)*, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran uang *(cash in and cash out)*. Sering kali istilah *cost accountability* juga digunakan untuk kategori akuntabilitas ini.

2.1.4.2 Tujuan Akuntabilitas

Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. (Ana, 2021)

Untuk mengukur kinerja mereka secara objektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Sekolah dikatakan memiliki

Akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4.3 Indikator Akuntabilitas

Disamping memiliki indikator efisiensi, juga harus memiliki indikator akuntabilitas dimana pengelolaan dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel menurut indikator-indikator tertentu. Agar sekolah memiliki akuntabilitas yang tinggi maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
b. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
c. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
d. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
e. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun.
f. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.
g. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan
h. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru. (Haniyyah, 2014)

2.1.5. Transparansi

2.1.5.1 Pengertian Transparansi

Tranparansi dibangun atasdasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. (Kamaluddin, 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 pasal 59 ayat 4 berbunyi prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dansatuan pendidikan sehingga:

a. Dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
b. Dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Transparansi berarti keterbukaan *(openess)* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Laporan keuangan untuk mendukung pembuat keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya dan membantu dalam

mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. (Rahayu, 2021)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Penyelenggaraan pemerintah dalam hal ini adalah penyelenggaraan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah. (Pebrianti, 2021)

Keterbukaan sekolah sebagai sebuah institusi pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat sekolah menjadi bertanggungjawab kepada semua pihak terkait yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Transparansi sekolah adalah keadaan di mana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi sangatlah jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentangapa yang dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar kepada publik. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan pada status data dalam laporan suatu sekolah, transparansi penuh menyaratkan bahwa perubahan itu harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait *(stakeholders).* (Tuzzahra, 2022)

2.1.5.2.Tujuan Transparansi

Pengembangan transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak KKN dan berwibawa dalam arti profesional.

Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat. (Nuryanto, 2018)

2.1.5.3.Indikator Transparansi

Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam kerangka meningkatkan transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis (*brouser, leaflet, newsletter*, pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (radio dan televisi lokal). (Nuryanto, 2018)

Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi dalam menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara

mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah fasilitas *database*, sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di sekolah maupun prosedur pengaduan.

2.1.6. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "*That is, the greater the extent it which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*" (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas) (Jibril, 2017)

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Rifa'i, 2013). Pendapat tersebut mengartikan efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan

tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuatujuan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat James L. Gibson yang dikutip oleh Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianaya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. dalam (Akhiarullah, 2023)

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

No	Nama	Judul penelitian	Variabel	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Ita Rakhmawati (2018)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan	• Akuntabiltas (X1) • Transparansi (X2) • Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y) • Partisipasi	Kuantitatif Populasi dan sampel	Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana BOS.

		Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi	Stakeholder (Variabel Moderasi)		Interaksi antara akuntabilitas dan partisipasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Interaksi antara transparansi dan partisipasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
2	Rachmi (2017)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	• Akuntabiltas (X1) • Transparansi (X2) • Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y)	Kuantitatif Populasi dan sampel	Akuntabilitas dan transparansi mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS.
3	Adinda Amalia Putri Tanjung, Nelly Masnila, M. Husni Mubarok (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Orang tua Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sd Dan Smp	• Akuntabilitas (X1) • Transparansi (X2) • Partisipasi Orang Tua (X3) • Efektivitas Pengelolaan Dana BOS (Y)	Kuantitatif Populasi dan sampel	Variabel Akuntabiltas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan

					Dana BOS. Partisipasi Orang Tua berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.

2.3 Kerangka Teoretik

Masalah utama dalam pelaksanaan dana BOS sampai saat ini masih kurangnya tata kelola yang baik terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi sehingga penyimpangan atau penyelewengan dana BOS masih dapat terjadi sehingga untuk mewujudkan efisiensi pengelolaan dana pendidikan dengantepat masih susah dilaksanakan.

Efisiensi pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan. (Rahman, 2017).

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah, dalam hal ini kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bendahara untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Yenti, 2018)

Transparansi berarti keterbukaan (*openess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Laporan

keuangan untuk mendukung pembuat keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya dan membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. (Rahayu, 2021)

Jadi hubungan antara transparansi dengan efisiensi pengelolaan dana pendidikan yaitu keterbukaan atas penggunaan uang pendidikan dari mana sumbernya, jumlahnya berapa dan dialokasikannya harus tepat.

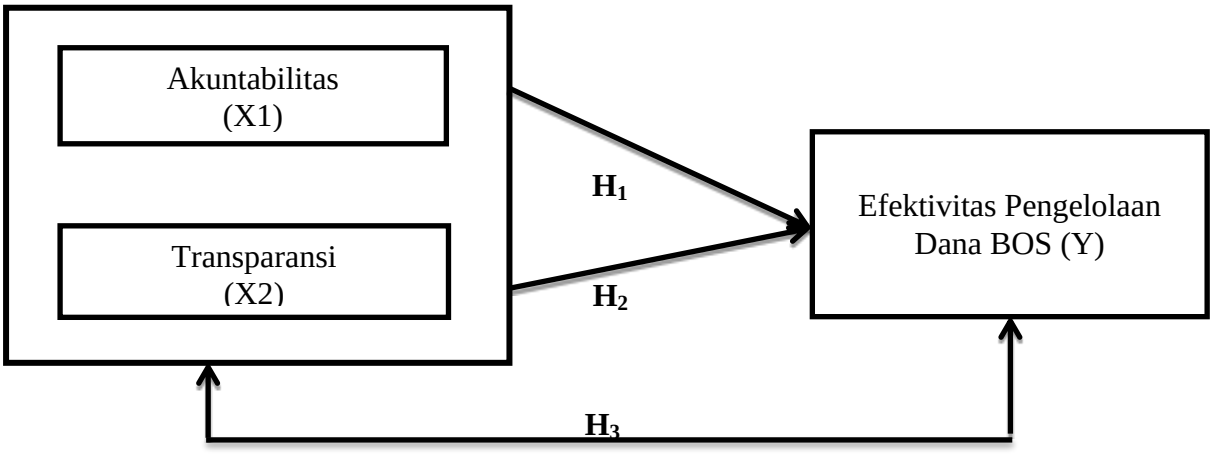

Gambar 2.1 Skema Kerangka Teoretik

2.4 Perumusan Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan variabel yang ada pada penelitian ini, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Susanti, 2019). Demikian halnya dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, maka dalam proses pelaksanaannya perlu adanya akuntabilitas. Dengan adanya akuntabilitas, maka akan diketahui apakah kinerja sekolah dapat diterima atau tidak oleh stakeholder. Sehingga jika akuntabilitas tinggi maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga tinggi, namun sebaliknya jika akuntabilitas rendah, maka efektivitas pengelolaan dana BOS juga ikut rendah. Hal ini didasari oleh teori efektivitas yang menyatakan bahwa, efektifvitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Rachmi, 2017).

Beberapa studi empiris yang telah menemukan hubungan positif

antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS Anggraini (2015); Rachmi (2017); Trisnawati (2018); Fauzan (2014); dan Rakhmawati I (2018). Ammar dan Bustamam (2019) melakukan penelitian pada SMP Negeri 3 Banda Aceh dan SMP Islam YPUI Darul Ulum Banda Aceh, dalam hasil mereka juga menemukan hubungan positif antara akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana BOS. Maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS

2.4.2. Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya (Rachmi, 2017).

Keterbukaan inilah yang menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak sekolah dalam mengelola dana BOS. Akibatnya pelanggaran dan penyelewengan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat berkurang. Sejalan dengan teori efektivitas maka tujuan sekolah dapat

dicapai, anggaran yang didapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Sehingga dengan transparansi ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS di sekolah. Hasil penelitian Ammar dan Bustamam (2019); Anggraini (2015); Susanti (2019); dan Rakhmawati I (2018) menemukan hubungan positif antara transparansi dan efektivitas pengelolaan dana BOS. Rachmi (2017) melakukan penelitian pada 30 Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Cianjur. Pada penelitian mereka menemukan hubungan positif antara transparansi dan efektivitas pengelolaan dana BOS. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui hipotesisnya adalah:

H_2: ***Transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS.***

2.4.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua hal penting yang dibutuhkan dalam suatu pengelolaan keuangan. Suatu laporan keuangan dikatakan aman yaitu jika dana tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dilaporkan secara terbuka keuangannya. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomesnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep manajemen keuangan sekolah pengelolaan dana BOS dapat dikatakan efektif jika penggunaanya tepat pada sasaran dan mampu mencapai outcomes yang

telah ditetapkan. Rakhmawati (2018) melakukan penelitian terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana BOS dengan hasil penelitian sebagai berikut ; Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS. Sedangkan Transparansi Berpengaruh Negatif dan Tidak . Oleh karena itu dapat diketahui Hipotesisnya adalah ***H_3: Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS***

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari kuisioner yang telah diisi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf kurikulum, staf humas, staf sarana prasarana, staf kesiswaan, bendahara, kepala tata usaha, komite sekolah dan guru di daerah Bangun Purba sebagai responden.

3.2. Populasi dan Sampling

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf humas, staff kurikulum, staf kesiswaan, staf sarana prasarana, bendahara, kepala tata usaha, komite sekolah dan guru yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang baik tentang konsep, prosedur, dan sistem mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian serta pelaporan tentang penggunaan dana pendidikan (BOS) di SMA, MA dan SMK di Kecamatan Bangun Purba.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi penelitian. Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimilki oleh sebuah populasi. Jenis sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sampel jenuh adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus dapat mewakili *(Representative)*. Oleh karena itu, sampel pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, staff keuangan dan guru yang mengelola penerimaan bantuan Dana BOS di SMA,SMK dan MA di Kecamatan Bangun Purba. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel 3.1.
Sampel Penelitian

No	Nama Sekolah	Jumlah Sampel
1	SMKN 1 Bangun Purba	3
2	SMAN 1 Bangun Purba	3
3	MAS Al – Fatah	3
4	MA PP Al - Kahfi	3
Total Sampel		12 sampel

Sumber : Data diolah peneliti

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara

menyebarkan kuisioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pernyataan tertulis. Kuisioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian dan diberikan kepada responden.

Kuisioner yang disebar berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efisiensi pengelolaan dana pendidikan. Jawaban responden akan diukur dengan menggunakan skala likert yaitu pilihan jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 poin sebagai skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang (×) pada kolom yang dipilih. Berikut ini adalah penjelasan 5 poin skala likert (Sugiyono, 2018:152):

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Ragu-ragu (R)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

3.4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel - variabel yang dianalisis di dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

3.4.1. Variabel Dependen

Menurut Sugiyono (2007: 4), variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektifitas pengelolaan dana pendidikan. Menurut Nanang Fattah (2010 : 11)

dalam buku Mulyono, Efektifitas pembiayaan pendidikan adalah penggunaan biaya pendidikan secara tepat sesuai dengan tingkat prioritas kebutuhan guna mewujudkan proses pembelajaran yang bermutu sehingga menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan (Mulyono, 2010).

Menurut Mulyono (2010) efektifitas pengelolaan dana pendidikan ditentukan dengan sebagai berikut: 1. Tepat sasaran 2. Tepat jumlah 3. Tepat waktu.

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Susanti, 2019). Agar sekolah memiliki akuntabilitas yang tinggi maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.

2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/stakeholders di akhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik dan menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
7. Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

b. Transparansi (X2)

Transparansi didefinisikan sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengetahuinya (Rachmi, 2017). untuk menciptkan transparansi maka upaya-upaya yang perlu dilakukan yaitu:

1. Pendayagunaan berbagai jalur komunikasi baik secara langsung, tidak langsung maupun media elektronik.
2. Menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.
3. Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah.

c. Efektifitas (Y)

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Rifa'i, 2013). Dengan kata lain efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Adapun ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianaya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. (Akhirullah, 2023)

Tabel 3.2.
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Efektivitas Pengelolaan Dana BOS	Pencapaian hasil kegiatan atau program dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan *output* dan *outcome.* (Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).	1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan 3) Proses analisis dan perumusan kebijkan yang sempurna 4) Perencanaan yang tepat 5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja 6) Pelaksanaan efektif dan efisien 7) Penyusunan program yang tepat 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
2	Transparansi	Keterbukaan (*open prosess*) pemerintah dalam memberikan infromasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Mardiasmo, 2009)	1) Informatif a. Jelas b. Tepat waktu c. Memadai d. dapat dibandingkan e. mudah diakses 2) Pengungkapan a. Kondisi keuangan b. Bentuk perencanaan dan hasil kegiatan
3	Akuntabilitas	Kewajiban pihak pemegang saham (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan	1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2) Akuntabilitas manajerial 3) Akuntabilitas program 4) Akuntabilitas kebijakan 5) Akuntabilitas finansial

		mengungkapkan segala aktifitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amana yang memilik hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2009).	

Sumber : Nupus, S.H (2021)

3.5. Teknik Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini, alat analisa yang digunakan adalah minimum, maksimum, sum, mean, dan standar deviasi.

3.5.2. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu taraf dimana alat pengukur dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga suatu penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengukurannya perlu diuji validitasnya. Uji validitas adalah hubungan positif skor item pertanyaan dengan skor total item pertanyaan dalam suatu variable yang tujuannya mengukur sah tidaknya suatu alat ukur. Apabila angka r hitung > r table, maka penelitian dikategorikan

valid. Dan bila sebaliknya, r hitung < r table, maka penelitian dikategorikan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi konstruk atau variabel penelitian. Suatu kuisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variable dikatakan reliable jika memiliki Crockbach Alpha > 0.60 (Hengky Latan dan Selva Temalagi, 2013).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, maka harus memenuhi asumsi klasik yang digunakan yaitu: uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas. Kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji-t dan uji-f serta untuk menentukan ketepatan model menggunakan koefisien determinasi.

3.5.3. Uji Hipotesis

Pengujian Hipotesis Setelah melakuakn uji statistic deskriptif dan uji asumsi klasik dalam model regresi, langkah selanjutnya yaitu melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi (adjusted R2) dan uji statistic t (uji t):

1. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan beberapa variabel dependen

(Fahlevi, 2013). Namun R2 (R square) tidak memiliki faktor korelasi sehingga jika dalam model ini variabel bebas terus ditambah maka nilai R akan terus membesar.

Sementara itu variabel bebas belum tentu manaikan angka adjusted R2 sebab ia mampu menjelaskan apakah proporsi keragaman variabel bebas atau tidak. Penambahan variabel bebas belum menjadi jaminan nilai adjusted R2 meningkat sebab terkadang terdapat variabel yang sebenarnya tidak mampu menjelaskan keragaman variabel terikat masuk kedalam model sehingga secara implisit merusak model, (Nussiyono, 2015). Sehingga penelitian ini menggunakan *adjusted* R2 .

2. Uji Statistik T (Uji t)

Ghozali (2016:171) menyatakan bahwa uji t atau t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, yaitu membandingkan antara T_{hitung} dengan T_{tabel}. Pengujian ini dilakukan dengan syarat sebagai berikut :

a. Jika T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} maka H_0 diterima yang artinya Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
b. Jika T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} maha H_0 ditolak yang Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu pengujian ini juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan nilai signifikan t pada tingkat α (0,05). Analisis didasarkan pada perbandingan antara signifikan t dengan signifikan 0,05. Dasar keputusan yang diambil dalam uji t yaitu : a. Jika signifikan t < 0,05, maka hipotesis H_0 ditolak. Artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. b. Jika signifikan t > 0,05, maka hipotesis H_0 diterima. Artinya bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS secara simultan dan parsial.

Menurut Sugiyono (2014:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R 2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota data atau kasus

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikan level 5% atau dengan degree freedom = k (n-k-1) dengan kriterian sebagai berikut :

H_0- ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig < α

H_0- diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig > α

Jika terjadi penerimaan H_0, maka dapat diartikan tidak berpengaruh signifikan model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

3.5.4. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi stakeholders terhadap efisiensi pengelolaan dana pendidikan di SMA, MA, dan MA Kabupaten Bangun sebagai variabel dependen.

Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

Rumus: Y = a + b1 X 1 + b2 X2 + e

Keterangan :

Y : Efisiensi Pengelolaan Dana Pendidikan

a : Konstanta

b1 : Koefisien regresi untuk variabel

X1: Akuntabilitas

b2 : Koefisien regresi untuk variabel

X2 : Transparansi

e : error